

# Ada yang Ngadu via Medsos Bupati

## Warga Miskin Belum Dapat Bansos



WTP - Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz menerima predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

**KLATEN, TRIBUN** - Bupati Klaten, Sri Mulyani menyebut bahwa masih ada warga miskin di daerahnya yang belum mendapat program bantuan sosial.

Aduan itu masuk ke media sosial pribadinya, mulai dari instagram, twitter hingga ke nomor whatsapp pribadinya.

Ia pun meminta organisasi perangkat daerah atau OPD dan elemen terkait untuk lebih teliti dalam memberikan bansos ke warga Klaten.

"Medsos saya kan, ada instagram, twitter dan WA saya secara langsung, setiap keluhan akan langsung saya tindak lanjut ke Pak Dinsos P3AKB," ujar Mulyani di Gedung RSPD Klaten, Selasa (24/5).

Menurut dia, setiap laporan yang masuk akan langsung dilakukan penilaian oleh tim dari Dinas Sosial dan P3AKB Klaten. Seandainya warga yang melapor tersebut memang sangat membutuhkan



**Medsos saya kan, ada instagram, twitter dan WA saya secara langsung, setiap keluhan akan langsung saya tindak lanjut.**

beberapa bantuan sosial yang terindikasi salah sasaran di Kabupaten Klaten.

"Masih adalah, tidak mungkin semuanya betul. Saya tahunya ini dari media sosial saya, secara langsung dari dinas laporan tidak ada, tapi dari medsos saya ada," ucap Mulyani.

Untuk mengurai permasalahan itu, lanjut Mulyani, Pemerintah Kabupaten

Klaten bakal mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

"Setelah Klaten menyandang kemiskinan ekstrem karena pasca dampak pandemi, dari 11 persen kemudian naik. Kita sudah menyusun strategi dengan potensi APBD mulai dari perubahan hingga 2022, akan terus genjot program untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Klaten," ucapnya.

Ia menyebut peran PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat besar dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AKB, Much Nasir menyebut jika untuk Klaten saat ini terdapat lima kecamatan yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Pihaknya pun sudah melakukan pertemuan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengurai permasalahan tersebut. (mur)

## Predikat WTP Itu Hasil Kerja Seluruh Komponen

**KOTA MAGELANG, TRIBUN** - Pemerintah Kota Magelang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2021.

Hasil itu diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (23/5).

Wali Kota Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz, yang hadir pada acara tersebut mengatakan, predikat WTP bagi Kota Magelang untuk keenam kalinya ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan.

Prestasi tersebut membuktikan seluruh komponen di kota ini telah bekerja sesuai regulasi yang ditetapkan.

"Predikat WTP sebuah prestasi hasil kerja seluruh komponen di Kota Magelang, kita telah bekerja sesuai regulasi. Kita harus mempertahankan WTP ini," katanya dalam keterangan tertulis.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, sangat mengapresiasi kepada setiap Kepala Daerah dan jajarannya yang telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk menyampaikan LPKD tepat waktu.

Dengan memperhatikan kecukupan bukti-bukti, perhitungan risiko, perhitungan materialitas serta permasalahan selama pemeriksaan, maka BPK memberikan opini BPK atas LPKD 11 daerah di Jawa Tengah.

Ke-11 daerah tersebut adalah Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Purbalingga, Brebes, Kebumen, Jepara, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan dan

Wonosobo.

Ayub mengungkapkan, capaian yang baik tersebut harus dipertahankan, serta diharapkan memberikan dorongan dan motivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan LKPD masing-masing.

"Mari terus berusaha dan berkomitmen untuk mendukung adanya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," tegas Ayub.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Susilowati menyatakan, langkah yang dilakukan Pemkot Magelang untuk memperoleh WTP di antaranya membangun komitmen bersama dengan OPD untuk bisa mempertahankan opini WTP setiap tahunnya, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, adanya kesesuaian antara laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kita juga selalu berupaya mengungkapkan informasi keuangan sesuai dengan SAP, meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta secara rutin melakukan verifikasi dan rekonsiliasi baik mengenai laporan BMD (Barang Milik Daerah) maupun laporan keuangan," jelas Susi.

Untuk diketahui, pada kegiatan penyampaian opini WTP, Wali Kota Aziz didampingi Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur, Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, serta pejabat terkait Pemkot Magelang. (ndg)

## Pedagang Daging Sapi Bilang Masih Aman

**MAGELANG, TRIBUN** - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang menemukan suspek

penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap sembilan ekor sapi dan satu kerbau.

Untuk mengantisipasi sebaran, pemerintah langsung mengambil langkah antisipasi dengan menutup seluruh pasar hewan mulai 24 Mei-6 Juni 2022.

Namun demikian, kondisi ini tidak terlalu mengancam pasar daging di Magelang. Sejumlah pedagang mengaku permintaan daging sapi masih aman.

Jubaedah (46) pedagang daging di Pasar Borobudur mengatakan, dirinya sudah mengetahui adanya berita terkait PMK di Magelang.

"Sudah (tahu beritanya) tadi pagi, sejauh ini permintaan daging sapi masih sama saja, tidak ada penurunan tidak tahu juga kalau besok seperti apa. Karena, kan pasar hewan ditutup ya," ujarnya saat ditemui di lokasi pada Selasa (24/5).

Ia mengatakan, daging sapi yang dijualnya merupakan hasil dari peternak di daerah Cangkuk Magelang.

Sedangkan, untuk harga



LAYANI PEMBELI - Penjual dagig sapi di Pasar Magelang sedang melayani pembeli, Selasa (24/5).

sapi pasca ditemukannya suspek PMK, ia mengaku harga masih tetap sama.

"Benar ini (daging) dari peternak lokal Cangkuk. Kalau harga daging (sapi) masih normal Rp140 ribu per kilogramnya," tuturnya.

Pedagang di Pasar Rejowinangun, Wagira (53) mengatakan, sejak ada wabah PMK banyak pembelinya yang menjadi lebih selektif.

"Kalau permintaannya masih sama tetapi pembeli jadi lebih selektif, tanya ini daging dari mana, segar tidak seperti itu," ucapnya.

Ia menambahkan, dirinya pun menjadi lebih teliti sebelum membeli daging sapi

untuk dijual. Bahkan, agar daging sapi yang dijual aman dirinya hanya membeli dari peternak sapi yang sudah menjadi langganan.

"Ya, belinya lebih teliti lagi sekarang cuma stok dari peternaknya langsung yang sudah dikenal, jadi tahu lah prosesnya. Kalau, dulu masih mau mengambil dari kulu-lakan sekarang tidak dulu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Joni Indarto mengatakan, suspek PMK ditemukan di beberapa wilayah yakni Salam, Salaman, dan Grabag. "Sementara ada 9 ekor

sapi dan 1 kerbau suspek PMK. Diketahui dibeli dari pasar hewan di Muntilan dan Salatiga," ungkapnya.

Dengan adanya temuan tersebut, pihaknya pun langsung mengambil langkah antisipasi dengan menutup seluruh pasar hewan mulai 24 Mei-6 Juni 2022.

Kebijakan itu diambil sebagai langkah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak dan Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Benar kami tutup sementara, untuk mencegah penularan dan penyebaran PMK. Kami akan lakukan pengawasan kepada ternak milik para peternak yang ada di sini. Karena, dari data di Kabupaten Magelang ada sekitar 80 ribu ekor sapi dan 160 ribuan ekor domba dan kambing," urainya. (ndg)

## Saatnya Mendorong Percepatan Program Hilirisasi Batu Bara

**YOGYA, TRIBUN** - Kondisi geopolitik global mendorong terjadinya peningkatan harga komoditas batu bara, bahkan menjadi sejarah baru dalam harga batu bara.

Demikian disampaikan Dr. Supandi, S.T., M.T.

Dosen Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).

Dampak harga ini, lanjut dia, juga sangat dirasakan bagi industri pertambangan batu bara yang ada di Indonesia.

Peningkatan harga batu bara ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri batubara, peningkatan cadangan batubara dan juga pendapatan negara dari royalti maupun PNPB.

"Batu bara merupakan hasil tambang yang tidak terbarukan dan suatu saat akan habis sehingga memanfaatkan batu bara seoptimal mungkin perlu dilakukan untuk memberikan manfaat lebih besar lagi bagi kehidupan, masyarakat dan negara, khususnya bangsa Indonesia," papar dia.

Selama ini batu bara dijual dalam bentuk murni batu bara sehingga saat ini sudah waktunya kita mendorong road map untuk hilirisasi batubara.

Peningkatan harga batu bara saat ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong peningkatan nilai tambah batu bara.

"Peningkatan harga minyak dunia juga mendorong untuk hilirisasi batu bara sebuah kesempatan yang menarik," tambahnya.

Hilirisasi batu bara dilakukan de-

ngan mengubah batu bara menjadi produk turunannya, misalkan menjadi pupuk, methanol atau produk produk lainnya.

Industri-industri ini sudah banyak dikembangkan di luar negeri dan sudah saatnya di

bawa masuk ke Indonesia.

Nilai modal untuk memulai industri ini memang cukup besar sehingga tidak mungkin dibebankan kepada pemerintah sehingga sudah saatnya untuk menggandeng pihak swasta untuk terjun dalam bidang hilirisasi batu bara.

Pihak pemerintah menurutnya juga dapat memberikan kebijakan untuk mendorong implementasi dari hilirisasi ini.

Pemerintah dapat mensinergikan implementasi hilirisasi batu bara dengan mengambil besaran tertentu dari margin batu bara saat ini yang cukup besar.

Konsep ini berbasis kewilayahan dan cadangan sehingga ketika industri hilirisasi ini berjalan dapat mendapatkan supply bahan baku yang memadai.

Jumlah nilai modal dapat dibagi kepada jumlah cadangan berbasis kewilayahan sehingga tidak memberatkan industri batu bara dan dapat memastikan keberlanjutan bahan baku.

Misalkan untuk nilai-nilai modal perlu 1 miliar dolar AS maka dapat



DR. SUPANDI, S.T., M.T.

dibagi setiap wilayah yang memiliki cadangan batu bara 500 juta ton wajib memiliki satu industri hilirisasi batu bara.

Dengan asumsi ini maka setiap ton batu bara wajib memberikan kontribusinya untuk hilirisasi sebesar 2 dolar AS dan tentunya nilai 2 dolar AS ini masih memungkinkan dalam kondisi saat ini.

Konsep besarnya wilayah dan cadangan dapat dianalisis menjadi sebuah kebijakan untuk kontribusi kepada program hilirisasi batu bara.

Program hilirisasi batu bara wajib kita dorong dan mulai saat ini sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. (rls/ord)

## Tanggul di Semarang Jebol, PLN Respon Cepat Amankan Jaringan Listrik

**Semarang, 23 Mei 2022** - PLN bergerak cepat melakukan tindakan pengamanan pasca jebolnya tanggul laut di Tambak Mulyo, Kecamatan Tanjung Mas, Semarang pada Senin, (23/5) sekitar pukul 14.00 WIB dengan menghentikan sementara aliran listrik.

General Manager PLN UID Jateng & D.I. Yogyakarta, M. Irwansyah Putra mengatakan PLN mengambil langkah preventif untuk mencegah potensi bahaya listrik.

"Demi keselamatan masyarakat, kami mengambil tindakan penghentian aliran listrik sementara di lokasi kejadian maupun di sekitarnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akibat arus listrik," ungkapnya saat meninjau langsung lokasi tanggul jebol didampingi Senior Manager Komunikasi & Umum, Ahmad Mustaqir dan Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Eric Rossi pada Senin, (23/5).

Akibat kejadian ini, daerah Pelabuhan Tanjung Mas dan Komplek industri Lamicitra tergenang air rob dan PLN terpaksa harus mengamankan sebanyak 408 gardu distribusi yang menyalurkan listrik ke sebanyak 35 ribu pelanggan baik yang berada di lokasi banjir maupun di luar lokasi banjir.

Irwansyah menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan situasi dan kondisi debit air di titik lokasi terdampak banjir. Apabila air sudah surut dan kondisi sudah aman, PLN akan berupaya secepat mungkin menyalurkan kembali aliran listrik ke pelanggan.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat, apabila banjir menggenangi rumah, agar dapat melakukan pengamanan kelistrikan secara mandiri, langkah pengamanan kelistrikan yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah memutus aliran listrik yang terhubung ke rumah dengan cara mematikan kWh Meter," imbuh Irwansyah.

Selanjutnya cabut alat elektronik yang masih terhubung ke stop kontak dan naikan ke tempat yang lebih tinggi. Setelah banjir surut pastikan alat-alat elektronik dalam kondisi kering sebelum digunakan kembali.

"Apabila masyarakat ingin melakukan pengaduan terkait dengan kelistrikan dapat melaporkan ke PLN melalui Aplikasi New PLN Mobile atau layanan Contact Center PLN 123," pungkasnya.